



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN APBD  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020  
(PPAS- P)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Tahun 2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun tahunan. Sejalan dengan amanat tersebut, pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan KUPA ini sekaligus juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KUPA Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2020. Selanjutnya, KUPA dan PPAS Perubahan merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2020 dan berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan dan kegiatan daerah selama satu tahun anggaran.

## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pendapatan daerah yang dirancang berdasarkan kondisi tatanan baru pandemi *Covid-19* dengan penyesuaian pendapatan tahun berjalan dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama tiga tahun terakhir dan kondisi *Covid-19* tahun berjalan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah sesuai kondisi tatanan baru

Berdasarkan kebijakan dimaksud di atas, diproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1.988.641.667.704,54 dirancang menurun sebesar Rp332.134.659.951,90 atau 14,31% dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp2.320.776.327.656,44 Rancangan pendapatan daerah ini dikontribusi oleh PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah perubahan dirancang sebesar Rp332.572.650.874,71 dirancang menurun sebesar Rp69.645.254.125,29 atau 17,32% dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp402.217.905.000,00.

Dana Perimbangan setelah perubahan dirancang sebesar Rp1.185.907.172.000,00 dirancang menurun sebesar Rp147.516.099.000,00 atau 11,06% dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp1.333.423.271.000,00. Dana Perimbangan setelah perubahan ini dikontribusi oleh Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dirancang sebesar Rp26.986.938.000,00 menurun sebesar Rp6.390.205.000,00 atau 19,15% dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp33.377.143.000,00. Dana Alokasi Umum dirancang sebesar Rp910.488.837.000,00 dirancang menurun sebesar Rp98.593.595.000,00 atau 9,77% dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp1.009.082.432.000,00. Dana Alokasi Khusus dirancang sebesar Rp248.431.397.000,00 dirancang menurun sebesar Rp42.532.299.000,00 atau 14,62% dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp290.963.696.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan dirancang sebesar Rp470.161.844.829,83 dirancang menurun sebesar Rp114.973.306.826,61 atau 19,65% dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp585.135.151.656,44. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan ini dikontribusi oleh Hibah dirancang sebesar Rp99.979.200.000,00 meningkat sebesar Rp11.177.600.000,00 atau 12,59% dari sebelum perubahan sebesar Rp88.801.600.000,00. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dirancang sebesar Rp114.018.917.069,83 menurun sebesar Rp56.572.299.826,61 atau 33,16% dari sebelum perubahan sebesar Rp170.591.216.896,44. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus dirancang sebesar Rp167.369.044.000,00 menurun sebesar Rp2.621.707.000,00 atau 1,54% dari sebelum perubahan sebesar Rp169.990.751.000,000. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dirancang sebesar Rp88.794.683.760,00 menurun sebesar Rp66.956.900.000,00 atau 42,99% dari sebelum perubahan sebesar Rp155.751.583.760,00.

### **BAB III**

#### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Pada Tahun 2020, pemerintah daerah merancang optimalisasi Belanja Daerah seiring dengan kebutuhan belanja, yang meliputi Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Terbatasnya belanja langsung yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan kebutuhan pembangunan diarahkan dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja, sejalan dengan amanat undang-undang tentang anggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran didasarkan pada penilaian seberapa besar output maupun outcome yang dapat dicapai oleh suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan pengalokasian anggaran belanja juga didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya penuntasan/penanganan masalah pertanian, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penanganan masalah lingkungan serta yang mampu meningkatkan pemanfaatan potensi lokal dalam menopang perekonomian daerah. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya dalam pengalokasian anggaran belanja adalah didasarkan pada program kegiatan untuk menangani kebutuhan mendesak. Tahun 2020 memulai tatanan baru pemulihan ekonomi di masa pandemi *Covid-19* serta secara bertahap dapat menyelesaikan tantangan fundamental yang dihadapi daerah.

Sejalan dengan kebijakan serta berbagai kebutuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Buleleng setelah perubahan merancang/memproyeksikan Belanja Daerah sebesar Rp2.060.074.605.054,04 menurun sebesar Rp287.141.222.681,40 atau 12,23% dari Belanja Daerah sebelum perubahan sebesar Rp2.347.215.827.735,44. Belanja daerah setelah perubahan dirancang sebagai berikut; (1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.152.772.600.676,71 menurun sebesar Rp74.003.736.384,32 atau 6,03% dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp1.226.776.337.061,03; (2) Belanja Langsung dirancang sebesar Rp907.302.004.377,33 menurun sebesar Rp213.137.486.297,08 atau 19,02% dari belanja langsung sebelum perubahan sebesar Rp1.120.439.490.674,41

Belanja Daerah setelah perubahan dirancang defisit sebesar Rp71.432.937.349,50 dibandingkan dengan sebelum perubahan dirancang defisit sebesar Rp26.439.500.079,00.

**BAB IV**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN**  
**PROGRAM *KEGIATAN***

Tabel 4.1  
Proyeksi Rencana Alokasi Anggaran Belanja Langsung per SKPD pada  
Perubahan Tahun Anggaran 2020

No	Perangkat Daerah	Perda APBD T.A 2020	R APBD Perubahan 2020	Bertambah/Berkurang		Proporsi BL Perubahan thd Total BL
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	165.489.978.000,00	174.646.061.000,00	9.156.083.000,00	5,53	18,28%
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	221.043.018.829,00	235.266.252.730,59	14.223.233.901,59	6,43	24,63%
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	115.579.340.936,00	119.646.581.920,04	4.067.240.984,04	3,52	12,53%
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	225.820.922.219,71	-	(225.820.922.219,71)	(100,00)	0,00%
1.01.03.02.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-	190.288.091.016,00	190.288.091.016,00		19,92%
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	38.887.122.000,00	-	(38.887.122.000,00)	(100,00)	0,00%
1.01.04.02.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	10.636.737.793,00	10.636.737.793,00		1,11%
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.343.291.000,00	4.048.736.000,00	(1.294.555.000,00)	(24,23)	0,42%
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	3.914.100.000,00	3.853.000.000,00	(61.100.000,00)	(1,56)	0,40%
1.01.05.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.747.870.200,00	2.204.495.262,00	(1.543.374.938,00)	(41,18)	0,23%
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	5.938.929.800,00	3.971.995.000,00	(1.966.934.800,00)	(33,12)	0,42%
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA	3.397.593.200,00	1.914.228.000,00	(1.483.365.200,00)	(43,66)	0,20%
1.02.02.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.178.230.000,00	7.783.442.643,00	(1.394.787.357,00)	(15,20)	0,81%



No	Perangkat Daerah	Perda APBD T.A 2020	R APBD Perubahan 2020	Bertambah/Berkurang		Proporsi BL Perubahan thd Total BL
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.230.858.000,00	-	(2.230.858.000,00)	(100,00)	0,00%
1.02.03.02.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	5.912.333.000,00	5.912.333.000,00		0,62%
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25.460.696.919,62	17.339.409.070,00	(8.121.287.849,62)	(31,90)	1,82%
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.325.732.000,00	6.666.560.509,00	(1.659.171.491,00)	(19,93)	0,70%
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.884.860.000,00	4.836.500.000,00	(1.048.360.000,00)	(17,81)	0,51%
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	7.789.195.000,00	4.010.574.406,00	(3.778.620.594,00)	(48,51)	0,42%
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	21.677.735.000,00	-	(21.677.735.000,00)	(100,00)	0,00%
1.02.10.02.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	-	7.897.065.493,00	7.897.065.493,00		0,83%
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.662.395.000,00	-	(2.662.395.000,00)	(100,00)	0,00%
1.02.11.02.	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	3.578.361.142,00	3.578.361.142,00		0,37%
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	4.475.064.000,00	-	(4.475.064.000,00)	(100,00)	0,00%

No	Perangkat Daerah	Perda APBD T.A 2020	R APBD Perubahan 2020	Bertambah/Berkurang		Proporsi BL Perubahan thd Total BL
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.02.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	2.963.000.000,00	2.963.000.000,00		0,31%
1.02.14.01.	DINAS STATISTIK	1.596.812.600,00	-	(1.596.812.600,00)	(100,00)	0,00%
1.02.16.01.	DINAS KEBUDAYAAN	10.218.773.000,00	4.460.000.000,00	(5.758.773.000,00)	(56,35)	0,47%
1.02.17.01.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	3.207.525.000,00	1.473.000.000,00	(1.734.525.000,00)	(54,08)	0,15%
2.00.01.01.	DINAS PERIKANAN	3.064.870.000,00	-	(3.064.870.000,00)	(100,00)	0,00%
2.00.02.01.	DINAS PARIWISATA	14.304.882.000,00	8.281.531.000,00	(6.023.351.000,00)	(42,11)	0,87%
2.00.03.01.	DINAS PERTANIAN	19.943.408.000,00	6.299.874.730,39	(13.643.533.269,61)	(68,41)	0,66%
2.00.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	6.301.824.000,00	-	(6.301.824.000,00)	(100,00)	0,00%
3.00.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.303.591.400,00	-	(6.303.591.400,00)	(100,00)	0,00%
3.00.01.02.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	4.809.670.000,00	4.809.670.000,00		0,50%
3.00.02.01.	BADAN KEUANGAN DAERAH	22.536.124.020,08	-	(22.536.124.020,08)	(100,00)	0,00%
3.00.02.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-	19.665.750.000,00	19.665.750.000,00		2,06%
3.00.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN	10.624.079.000,00	-	(10.624.079.000,00)	(100,00)	0,00%

No	Perangkat Daerah	Perda APBD T.A 2020	R APBD Perubahan 2020	Bertambah/Berkurang		Proporsi BL Perubahan thd Total BL
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.02.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	4.328.158.000,00	4.328.158.000,00		0,45%
3.00.05.01.	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	-	2.376.000.000,00	2.376.000.000,00		0,25%
4.00.01.02.	SEKRETARIAT DAERAH	46.641.527.650,00	35.024.500.000,00	(11.617.027.650,00)	(24,91)	3,67%
4.00.02.02.	SEKRETARIAT DPRD	43.277.247.100,00	30.827.242.778,31	(12.450.004.321,69)	(28,77)	3,23%
4.00.03.01.	INSPEKTORAT DAERAH	5.603.663.400,00	3.876.750.000,00	(1.726.913.400,00)	(30,82)	0,41%
4.00.04.01.	KECAMATAN TEJAKULA	1.824.095.000,00	1.157.921.949,00	(666.173.051,00)	(36,52)	0,12%
4.00.04.02.	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN	2.075.584.000,00	1.381.953.400,00	(693.630.600,00)	(33,42)	0,14%
4.00.04.03.	KECAMATAN SAWAN	1.715.728.000,00	1.194.424.336,00	(521.303.664,00)	(30,38)	0,13%
4.00.04.04.	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN	3.734.543.000,00	-	(3.734.543.000,00)	(100,00)	0,00%
4.00.04.05.	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN	28.296.413.400,00	-	(28.296.413.400,00)	(100,00)	0,00%
4.00.04.06.	KECAMATAN BANJAR	1.848.836.000,00	1.383.530.000,00	(465.306.000,00)	(25,17)	0,14%
4.00.04.07.	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN	3.388.221.000,00	-	(3.388.221.000,00)	(100,00)	0,00%
4.00.04.08.	KECAMATAN GEROKGAK	1.838.961.000,00	1.327.534.980,00	(511.426.020,00)	(27,81)	0,14%
4.00.04.09.	KECAMATAN BUSUNGBIU	2.130.525.000,00	1.305.500.000,00	(825.025.000,00)	(38,72)	0,14%
4.00.04.10.	KECAMATAN SUKASADA	-	2.011.500.000,00	2.011.500.000,00		0,21%

No	Perangkat Daerah	Perda APBD T.A 2020	R APBD Perubahan 2020	Bertambah/Berkurang		Proporsi BL Perubahan thd Total BL
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.11.	KECAMATAN BULELENG	-	12.288.010.884,00	12.288.010.884,00		1,29%
4.00.04.12.	KECAMATAN SERIRIT	-	2.005.500.000,00	2.005.500.000,00		0,21%
5.00.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.115.325.000,00	2.292.475.335,00	(822.849.665,00)	(26,41)	0,24%
<b>TOTAL</b>		<b>1.120.439.490.674,41</b>	<b>955.234.252.377,33</b>	<b>(165.205.238.297,08)</b>	<b>(14,74)</b>	<b>100%</b>

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Struktur APBD di samping menguraikan bagian Pendapatan dan Belanja daerah juga termasuk menguraikan tentang Pembiayaan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pada Perubahan tahun Anggaran 2020 dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah demikian juga Belanja daerah.

Sejalan dengan rencana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam perubahan tahun anggaran 2020 juga merumuskan rencana pembiayaan daerah untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja daerah dan pendapatan daerah, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi. Demikian pula Pemerintah Daerah dirumuskan kebijakan pembiayaan untuk mampu dan mengoptimalkan pembayaran hutang serta penyertaan modal yang menjadi kewajiban daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari sub Penerimaan pembiayaan dan Sub Pengeluaran pembiayaan.

#### **5.1. Sub Penerimaan Pembiayaan**

Setelah perubahan tahun 2020 Pemerintah Daerah merancang/memproyeksikan Sub Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp105.832.937.349,50 meningkat sebesar Rp34.393.437.270,50 atau 48,14% dibanding sebelum perubahan sebesar Rp.71.439.500.079,00.

#### **5.2. Sub Pengeluaran Pembiayaan**

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 merancang ataupun memproyeksikan Pembiayaan Daerah dari Sub Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp34.400.000.000,00. Anggaran Sub Pengeluaran pembiayaan ini direncanakan dialokasikan untuk rencana penyertaan modal/investasi pemerintah daerah.



## BAB VI PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2020 ini dibuat dan ditandatangani di atas materai yang cukup untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.

Singaraja, 27 Agustus 2020

**PIHAK II (KEDUA)**  
**PIMPINAN DPRD KAB. BULELENG**



Gede Supriatna, SH  
Ketua

I Ketut Susila Umbara, SH  
Wakil Ketua

Gede Suradnya  
Wakil Ketua

Dra. M. Putri Nareni  
Wakil Ketua

**PIHAK I (PERTAMA)**  
**BUPATI BULELENG**



Putu Agus Suradnyana, ST